

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

DRS. Andarus Darahim, M.P.A, Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga,(Jakarta Timur: IPGH Publishing, 2015), hlm. 128

KH. Abdullah Hasyim, Dimiyati Thaha ,Sarah tazkia, Herli ismailBuku keluarga sejahtera dan kesehatan reproduksi cetakan pertama 2008 (Diterbitkan Oleh Direktorat Advokasi Dan KIE BKKBN Jl. Permata No 1 Halim perdana kusuma-Jakarta timur)

Abdul Wahab, Solichin, 1997, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Penerbit P.T. Bumi Aksara, Jakarta.

Anggara, Sahya, 2014, Kebijakan Publik, Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung.

Islamy, Irfan, 2001, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Cetakan X, Bumi Aksara, Jakarta.

Jones, Charles O, 1996, Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy) Terjemahan Ricky Ismanto, Penerbit P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mulyadi, Dedy, 2015, Studi Kebjakan Publik dan Pelayanan Publik, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Nugroho D, Riant, 2006, Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Nurcholis, Hanif, 2007, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Penerbit P.T. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Sutrisno, Edy (2009), Mengenal Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan/Program, Penerbit, Untag Press, Surabaya.

ahir, Arifin, 2014, Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Penerbit Alfabeta, Bandung.



Subarsono, AG. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005

Tangkilisan, Hessel Nogi. S. Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Lukman Offset. 2003.

Tangkilisan, Hessel Nogi. S. Kebijakan Publik Yang Membumi. Jakarta: Lukman Offset. 2003.

B. Jurnal

Jurnal Sunarti Indikator Kesejahteraan yang Berkelanjutan (halaman 5-10 dan 11-14)

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Walikota Makassar Nomor 95 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pasal 17
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 RPJM
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 (pasal 1 ayat 15) Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga



- Peraturan Walikota Makassar Nomor 95 Tahun 2016 Pasal 17 Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

D. Internet

<https://setangigi.wordpress.com/tag/14-kriteria-miskin-menurut-bps/>

Kesejahteraan berdasarkan kriteria Biro Pusat Statistik (BPS), 2010, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2010, Berita Resmi Statistik, BPS, No.45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010, Jakarta.

<https://www.bkkbn.go.id/>

<http://format-lengkap-administrasi-desa.blogspot.co.id/2017/08/20-indikator-kesejahteraan-keluarga.html>

https://www.kompasiana.com/unik/penelitiankualitatif_55008172a333114e75510f2c

[Raka Online. 2011. Bine Keluarga. Diakses melalui: https://abiaryanionline.wordpress.com/2011/05/21/bina-keluarga-balita-bkb/ pada tanggal 8 Januari 2011](https://abiaryanionline.wordpress.com/2011/05/21/bina-keluarga-balita-bkb/)

E. PDF

KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Oleh: Herien
uspitawati Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas
kologi Manusia - Institut Pertanian Bogor 2013



